



Laporan Akhir Kajian Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

MUFTI FANSURI

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2021

**LAPORAN AKHIR
KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2021**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini dilatarbelakangi oleh realitas capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi Banten yang belum sesuai ekspektasi yaitu sebesar 61,12 dengan kategori B pada tahun 2020, jauh dari target RPJMD yang akan berakhir tahun 2022. Implementasi reformasi birokrasi juga belum menysasar pada 8 (delapan) area perubahan, masih bersifat formalitas dan belum mampu mewujudkan perubahan secara signifikan pada tata kelola pemerintahan daerah. Di sisi lain, kemajuan dan pemanfaatan IPTEK yang sangat massif menciptakan era disrupsi yang ditandai dengan karakteristik: *volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity*; diperparah dengan pandemi yang masih akan berkepanjangan, menuntut kapasitas pemerintah daerah yang lebih responsif dan adaptatif dalam mensikapi perubahan yang cepat dan mendasar tersebut.

Dengan mengadaptasikan pendekatan bauran secara sekuensial, survei secara kuantitatif dilakukan guna mengidentifikasi ragam jenis masalah implementasi kebijakan dengan menggunakan instrumen yang disintesis dari model implementasi kebijakan Dunn (2003), George Edward III (2018), serta Rondinelli dan Cheema (2012) yang menghasilkan 8 variabel dan 38 indikator komposit. Temuan survei dieksplorasi dengan pendekatan kualitatif, dianalisis sesuai kaidah model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994), menghasilkan 15 variabel strategis lain yang kemudian seluruhnya dianalisis lebih dalam guna memetakan masalah, mengidentifikasi peran dan peringkat variabel berdasarkan kekuatan pengaruh dan ketergantungannya, serta mengidentifikasi variabel kunci yang berperan krusial terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Analisis dimaksud menggunakan *prospective analysis* dengan memanfaatkan piranti lunak *MicMac* yang dikembangkan Godet & Bourse (1989).

Hasil penelitian mengkonfirmasi Indeks Implementasi Reformasi Birokrasi (IIRB) sebesar 2,67 yang terkategori kurang, yang dibarengi dengan meratanya sebaran permasalahan pada seluruh variabel dan indikator kompositnya, yang mengindikasikan bahwa implementasi reformasi birokrasi selama ini kurang berjalan efektif karena dilakukan dengan pendekatan administratif sehingga kurang menysasar substansi perubahan yang diharapkan, serta hanya *business as usual* tanpa diiringi perubahan yang signifikan pada tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Hasil analisis prospektif merekomendasi perubahan mendasar pada 10 (sepuluh) variabel strategis sebagai *influence variables* yang berperan paling krusial menentukan arah dan efektivitas implementasi reformasi birokrasi saat ini, maupun di masa depan, yaitu: kepemimpinan kepala daerah dan perangkat daerah yang lebih peduli, depolitisasi pengambilan kebijakan strategis, efektivasi peran agen perubahan, efektivasi fungsi pengawasan internal, penguatan komitmen bersama, penerapan *reward and punishment* secara konsisten dan konsekuen, peningkatan *rule of law* guna mencegah KKN, efektivasi internalisasi agenda reformasi birokrasi, optimalisasi partisipasi publik, serta penguatan integritas aparatur.